

LAPORAN KINERJA TA.2015
BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
PONTIANAK



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis BPTP Pontianak Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Dalam upaya merealisasikan *Good Governance*, BPTP Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis BPTP Pontianak Tahun 2014-2019. Visi BPTP Pontianak adalah “Menjadi Instansi Yang Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan Bagi Pelaku Usaha Perkebunan”. Untuk mencapai Visi tersebut, maka misi BPTP Pontianak adalah sebagai berikut: (a) Meningkatkan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan Yang Berwawasan Lingkungan; (b) Meningkatkan Pelayanan Analisis Perlindungan Perkebunan Kepada Pelaku Usaha Perkebunan; (c) Memperkuat Sistem Informasi Perlindungan Perkebunan (SIMPP) dan (d) Penegakan Hukum Di Bidang Perlindungan Perkebunan.

Sejalan dengan visi dan misi BPTP Pontianak, maka tujuan yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) Meningkatkan pengembangan teknologi terapan perlindungan perkebunan;
- 2) Meningkatkan pengembangan teknologi agens pengendali hayati dan pestisida nabati;
- 3) Meningkatkan fasilitasi pengamatan dan pengendalian (Organisme Pengganggu Tumbuhan) OPT perkebunan serta gangguan usaha perkebunan;
- 4) Meningkatkan pelayanan informasi perlindungan tanaman perkebunan;
- 5) Meningkatkan pengembangan jaringan laboratorium;
- 6) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM perlindungan perkebunan;
- 7) Meningkatkan kemampuan pengelolaan ketatausahaan, administrasi dan keuangan

Penyusunan LAKIN BPTP Pontianak ini mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPTP Pontianak serta Rencana Strategis BPTP Pontianak Tahun 2014-2019.

Pada tahun 2015, BPTP Pontianak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **8.583.870.000,-** (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapai 97,48%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2015 yaitu : tersedianya teknologi terapan perlindungan perkebunan sebanyak 10 (sepuluh) paket teknologi. Secara umum

pencapaian sasaran strategis dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun 2015 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BPTP Pontianak akan berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. LAKIN BPTP Pontianak tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kegiatan BPTP Pontianak untuk tahun-tahun selanjutnya, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPTP Pontianak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan penyertaan-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak Tahun 2015 ini dapat dilaksanakan. Laporan Kinerja (LAKIN) BPTP Pontianak ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta sarana evaluasi atas capaian kinerja BPTP Pontianak.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2015 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis BPTP Pontianak. Penyusunan laporan kinerja ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2015 akan menjadikan tolok ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2016.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akhirnya melalui Laporan Kinerja pada Tahun 2015 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan

Kementerian Pertanian secara keseluruhan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	I
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	1
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. ORGANISASI	2
1.2.1. <i>Kedudukan dan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak.....</i>	<i>2</i>
1.2.2. <i>Tugas Pokok dan Fungsi.....</i>	<i>3</i>
1.2.3. <i>Sumber Daya Manusia.....</i>	<i>1</i>
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	3
BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	3
2.1. RENCANA STRATEGIS	3
2.1.1. <i>Visi BPTP Pontianak.....</i>	<i>3</i>
2.1.2. <i>Misi BPTP Pontianak.....</i>	<i>3</i>
2.1.3. <i>Tujuan.....</i>	<i>3</i>
2.1.4. <i>Sasaran.....</i>	<i>4</i>
2.1.5. <i>Arah Kebijakan.....</i>	<i>4</i>
2.1.6. <i>Strategi.....</i>	<i>5</i>
2.1.7. <i>Kegiatan BPTP Pontianak Tahun 2015.....</i>	<i>6</i>
2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2015.....	7
2.2.1. <i>Program.....</i>	<i>7</i>
2.2.2. <i>Sasaran.....</i>	<i>7</i>
2.2.3. <i>Kegiatan.....</i>	<i>7</i>
2.2.4. <i>Fokus.....</i>	<i>8</i>
2.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015	8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1. PENGUKURAN KINERJA	10
3.1.1. <i>Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Program (Outcomes).....</i>	<i>10</i>
3.1.2. <i>Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs).....</i>	<i>10</i>
3.2. EVALUASI SASARAN	11
3.2.1. <i>Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Program (Outcomes).....</i>	<i>11</i>
3.2.2. <i>Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran(Outputs).....</i>	<i>11</i>
3.1. AKUNTABILITAS KEUANGAN	15
3.3.1. <i>Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2015</i>	<i>15</i>
3.4. PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT	16
3.4.1. <i>Permasalahan.....</i>	<i>16</i>
3.4.2. <i>Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian</i>	<i>18</i>
BAB IV. PENUTUP	21
4.1. KESIMPULAN	21
4.2. SARAN REKOMENDASI	21

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan salah satu pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini bertujuan untuk memberikan penilaian kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam penilaian pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Laporan akuntabilitas merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Penyusunannya mengacu pada Keputusan Kepala LAN No : 239/1A/6/8/2003, tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

LAKIN merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategik. Perencanaan Strategik (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi

pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya

Penyusunan LAKIN Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BPTP Pontianak pada tahun berikutnya. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja BPTP Pontianak dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

1.2. Organisasi

1.2.1. Kedudukan dan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkebunan, yang melaksanakan fungsi pelayanan teknis di bidang proteksi tanaman perkebunan.

BPTP Pontianak didukung perangkat pendukung yang memadai. Kegiatan operasional bidang proteksi dilaksanakan oleh tenaga teknis yang handal di bidangnya. Kegiatan BPTP Pontianak bersinggungan langsung dengan petani perkebunan melalui petugas Unit Pembinaan Perlindungan Tanaman (UPPT) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Dasar organisasi BPTP Pontianak adalah Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 11/Permentan/OT.210/02/ 2008 Tanggal 6 Pebruari 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak dan Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 72/Kpts/OT.140/4/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. Organisasi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak memiliki 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pelayanan Teknik, Seksi Data dan Informasi, Seksi Jaringan Laboratorium, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

BPTP Pontianak memiliki Tugas Pokok: Melaksanakan Analisis Teknis Dan Pengembangan Proteksi Tanaman Perkebunan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan **identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) perkebunan;**
2. Pelaksanaan **analisis data serangan** dan perkembangan situasi opt serta faktor yang mempengaruhinya;
3. Pelaksanaan **analisis data gangguan usaha perkebunan** dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhinya;
4. Pelaksanaan **pengembangan teknologi perbanyakan** dan pelaporan agens hayati opt perkebunan;
5. Pelaksanaan **pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil dan teknis pengendalian OPT perkebunan;**
6. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
7. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
8. Pelaksanaan **pengembangan teknologi proteksi perkebunan** yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
9. Pelaksanaan **pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;**
10. Pemberian pelayanan teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
11. Pengelolaan data dan dokumentasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi perkebunan.
12. Pelaksanaan **pengembangan jaringan data kerjasama laboratorium.**
13. Pelaksanaan **urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai.**

1.2.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a) Menurut Golongan

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPTP Pontianak Tahun 2015 berdasar Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5 Orang
2	III	45 Orang
3	II	35 Orang
4	I	0 Orang
JUMLAH SELURUH		85 Orang

b) Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPTP Pontianak Tahun 2015 berdasar Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin
No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	0 Orang
2	SLP	0 Orang
3	SLTA	19 Orang
4	D1	34 Orang
5	D3/ Sarjana Muda	5 Orang
6	D4	2 Orang
6	S1	21 Orang
7	S2	3 Orang
JUMLAH SELURUH		85 Orang

Keseluruhan pegawai BPTP terdiri dari PNS Pusat berjumlah 85 orang, PNS Daerah/petugas kabupaten yang diperbantukan ke BPTP 5 orang, pegawai kontrak sebanyak 6 orang sehingga total berjumlah 96 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di kota Pontianak (BPTP) sebanyak 49 orang (43 PNS dan 6 tenaga kontrak), dan 47 sisanya adalah petugas Unit Pembinaan Perlindungan Tanaman di 34 Kecamatan di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat, dengan rincian: (a) Kabupaten Pontianak (Kab. Mempawah) sebanyak 9 orang; (b) Kabupaten Kubu Raya 5 orang; (c) Kabupaten Landak 2 orang; (d) Kabupaten Bengkayang 6 orang; (e) Kota Singkawang 1 orang; (f) Kabupaten Sambas 6 orang; (g) Kabupaten Sanggau 6 orang; (h) Kabupaten Sekadau 1 orang; (i) Kabupaten Sintang 3 orang; (j)

Kabupaten Kapuas Hulu 2 orang; (k) Kabupaten Melawi 1 orang; (l) Kabupaten Kayong Utara 1 orang; (m) Kabupaten Ketapang 4 orang.

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi BPTP Pontianak

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Perlindungan Perkebunan, BPTP Pontianak pada tahun 2015 menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dukungan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. Kegiatan tersebut sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi BPTP Pontianak. Memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional, renstra pembangunan perkebunan dan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan, maka dirumuskan **Visi BPTP Pontianak** yaitu: “Menjadi Instansi Yang Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan Bagi Pelaku Usaha Perkebunan”.

2.1.2. Misi BPTP Pontianak

Untuk mencapai Visi tersebut, maka **Misi BPTP Pontianak** adalah sebagai berikut: :

- a. Meningkatkan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan Yang Berwawasan Lingkungan
- b. Meningkatkan Pelayanan Analisis Perlindungan Perkebunan Kepada Pelaku Usaha Perkebunan
- c. Memperkuat Sistem Informasi Perlindungan Perkebunan (SIMPP)
- d. Penegakan Hukum Di Bidang Perlindungan Perkebunan

2.1.3. Tujuan

- a. Meningkatkan pengembangan teknologi terapan perlindungan perkebunan;
- b. Meningkatkan pengembangan teknologi agens pengendali hayati dan pestisida nabati;
- c. Meningkatkan fasilitasi pengamatan dan pengendalian (Organisme Pengganggu Tumbuhan) OPT perkebunan serta gangguan usaha perkebunan;

- d. Meningkatkan pelayanan informasi perlindungan tanaman perkebunan;
- e. Meningkatkan pengembangan jaringan laboratorium;
- f. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM perlindungan perkebunan;
- g. Meningkatkan kemampuan pengelolaan ketatausahaan, administrasi dan keuangan

2.1.4. Sasaran

Berdasarkan tujuan di atas, BPTP Pontianak menetapkan sasaran kegiatan yang akan dicapai pada periode 2010-2015 sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Strategis BPTP Pontianak Tahun 2015

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya pengembangan Teknologi Terapan Perlindungan Tanaman Perkebunan	- Terwujudnya Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	- Jumlah Teknologi Terapan Perlindungan Tanaman Perkebunan - Pembangunan kebun contoh, demplot , uji koleksi (Ha)

2.1.5. Arah Kebijakan

BPTP Pontianak menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu (PHT)
- b. Pelaksanaan PHT merupakan tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah
 - Masyarakat melakukan pengendalian dikebunnya
 - Pemerintah berkewajiban memberdayakan masyarakat dan memberikan bantuan terbatas dalam penanggulangan “ekspos”
- c. Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pra tanam, masa pertumbuhan dan masa pasca panen
- d. Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui tindakan:
 - Pecegahan masuk dan tersebarnya OPT dari suatu area ke area lain

-
- Pengendalian OPT
 - Eradikasi OPT

2.1.6. Strategi

Untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan perkebunan selama periode 2015-2019, strategi BPTP Pontianak tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut:

1. Strategi untuk mencapai sasaran 1: Meningkatnya pengembangan perakitan teknologi perlindungan perkebunan, yaitu :
 - a. Meningkatkan fokus, prioritas, jumlah, kualitas dan capaian hasil perakitan teknologi perlindungan tanaman yang spesifik lokasi sesuai kebutuhan petani/pekebun
 - b. Meningkatkan sinergi dan sinkronisasi antara kegiatan uji perakitan teknologi dan deseminasi
 - c. Meningkatkan ketersediaan data dan hasil-hasil pengujian yang dapat di akses oleh pengguna/petani
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan BBP2TP, Ballit, Puslit dan perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan uji coba perakitan teknologi proteksi tanaman perkebunan
2. Strategi untuk mencapai sasaran 2 : Meningkatnya pengembangan teknologi pengendalian hayati dan pestisida nabati, yaitu :
 - a. Meningkatkan fokus, prioritas, jumlah dan kualitas pengembangan teknologi eksplorasi musuh alami dan pestisida nabati
 - b. Meningkatkan fokus, prioritas, jumlah dan kualitas pengembangan teknologi perbanyakan, formulasi dan aplikasi agensia hayati dan pestisida nabati
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan BBP2TP, Ballit, Puslit dan perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan teknologi pengendalian hayati
3. Strategi untuk mencapai sasaran 3 : Meningkatnya fasilitasi pengamatan dan pengendalian OPT perkebunan serta gangguan usaha perkebunan (GUP), yaitu :
 - a. Meningkatkan fokus, prioritas dan kualitas metode pengamatan, monitoring, surveilans dan peramalan OPT

-
- b. Meningkatkan fokus, prioritas dan kualitas metode monitoring dan penanganan GUP
 - c. Meningkatkan akurasi dan ketersediaan data OPT dan GUP yang dapat di akses oleh pengguna.
4. Strategi untuk mencapai sasaran 4 : Meningkatnya pelayanan informasi perlindungan tanaman perkebunan, yaitu :
 - a. Meningkatkan pengembangan teknologi informasi perlindungan perkebunan
 - b. Meningkatkan pengembangan dan penyebaran media informasi perlindungan perkebunan
 - c. Meningkatkan ketersediaan jumlah dan kualitas bahan/media informasi yang dapat diakses oleh pengguna
 5. Strategi untuk mencapai sasaran 5 : Meningkatnya pengembangan jaringan laboratorium, yaitu :
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium
 - b. Meningkatkan penerapan sistem mutu dan manajemen laboratorium
 - c. Menambah ruang lingkup akreditasi laboratorium
 - d. Meningkatkan kerjasama jaringan laboratorium dengan BBP2TP
 6. Strategi untuk mencapai sasaran 6 : Meningkatnya kemampuan SDM perlindungan perkebunan, yaitu :
 - a. Meningkatkan jenjang pendidikan formal (S1, S2, dan S3) bagi petugas BPTP
 - b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas melalui pelatihan/seminar/ simposium/workshop/studibandung dan magang
 - c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pusat, regional dan daerah melalui pertemuan teknis, pertemuan koordinasi atau pertemuan konsultasi dan pembinaan teknis regional

2.1.7. Kegiatan BPTP Pontianak Tahun 2015

1. Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll
2. Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan
3. Pemanfaatan Agensia Hayati
4. Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

-
5. Layanan Perkantoran
 6. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2015

2.2.1. Program

Mengacu pada hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010-2015 adalah **“Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.**

2.2.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dalam periode 2015 sesuai dengan tugas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2010-2015 adalah : Terwujudnya Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dan analisis teknis proteksi tanaman perkebunan

2.2.3. Kegiatan

Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dalam rangka pencapaian program perkebunan merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlindungan adalah *Dukungan Perlindungan Perkebunan..*

Komponen kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sesuai Renstra Balai Proteksi Tanaman Perkebunan tahun 2015-2019 adalah:

1. Pengembangan Teknologi Proteksi Perkebunan
 - a. Perakitan teknologi perlindungan tanaman perkebunan spesifikasi lokasi
 - b. Pengembangan Teknologi Agens Pengendali Hayati (APH) dan Pestisida Nabati (pesnab)
2. Peningkatan kemampuan Teknis Petugas
 - a. Pembinaan petugas UPPT

-
- b. Konsultasi Teknis Regional Kalimantan
 - c. Bimbingan teknis dan pengembangan jabatan fungsional pengendali OPT (POPT) Perkebunan;
 - 3. Fasilitasi Pengamatan dan Pengendalian OPT Perkebunan
 - a. Pengawasan identifikasi OPT utama tanaman perkebunan;
 - 4. Fasilitasi Gangguan Usaha Perkebunan non OPT (dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun)
 - a. Fasilitasi pemantauan kebakaran dan dampak perubahan iklim;
 - 5. Pemantapan Kelembagaan Perlindungan
 - a. Operasional Laboratorium LL, BPT, LUPH, dan Sub Laboratorium;
 - b. Pengembangan jejaring laboratorium
 - c. Administrasi Kegiatan;
 - 6. Pemantapan sistim informasi manajemen perlindungan perkebunan (SIMPP)
 - a. Pembuatan publikasi dan informasi perlindungan perkebunan (buku, Leaflet, poster dan peta);
 - b. Pemanfaatan Web Site Perlindungan Perkebunan
 - 7. Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan perkebunan
 - a. Akreditasi Laboratorium;
 - b. Penyediaan alat laboratorium.

2.2.4. Fokus

Fokus kegiatan pembangunan perkebunan yang terkait dengan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan adalah fokus **Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan**. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui **dukungan perlindungan perkebunan**

2.3. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2015

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) BPTP Pontianak merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala BPTP Pontianak untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki, dan memuat pernyataan

kesanggupan pencapaian kinerja BPTP Pontianak, dengan mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Mengacu pada renstra 2010-2015, untuk melaksanakan program Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan, BPTP Pontianak menyusun dokumen Penetapan Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja.

Tabel 4. Penetapan Kinerja BPTP Pontianak Tahun 2015

Sasaran strategis	Indikator kerja	satuan	target	Realisasi	
				volume	%
Penerapan teknologi proteksi Tanaman perkebunan	- Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan	paket	9	9	100
	- Pembangunan kebun contoh , demplot , uji koleksi	ha	40	40	100

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja
3.1.1. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Program (Outcomes)

Gambaran kinerja BPTP Pontianak Tahun 2015 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan target dan realisasi. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tahun 2015 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode skoring, yaitu (1) Sangat Berhasil (capaian >100%); (2) Berhasil (capaian 80-100%); (3) Cukup Berhasil (capaian 60-79%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap target yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTP Pontianak tahun 2015 dinilai berdasar pencapaian rencana tingkat capaian (target) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja BPTP Pontianak Tahun 2015

Sasaran Strategis : <i>Terwujudnya pengembangan teknologi terapan perlindungan tanaman perkebunan</i>				
INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
	Jumlah Teknologi Terapan Perlindungan Tanaman Perkebunan dengan uraian sebagai berikut:	9 Paket Teknologi		100
1.	Demplot	40 Ha	40 Ha	100
2.	Rakitan Teknologi Perlindungan Perkebunan	9 Paket	9 Paket	100
3.	Pengujian Agens Hayati	6 Jenis	6 Jenis	100

3.1.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs)

Rata-rata persentase pencapaian target fisik kegiatan BPTP Pontianak mencapai 99,10%.

Pada tahun 2015, terdapat kenaikan Pagu Anggaran sebesar Rp. 162.180.000,- dibandingkan tahun 2014. Berdasar capaian serapan anggaran, terjadi peningkatan serapan anggaran Satker BPTP Pontianak pada tahun 2015 yaitu mencapai 99,10% dari total anggaran, sedangkan pada tahun 2014 serapan mencapai 94,10%.

3.2. Evaluasi Sasaran

3.2.1. Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Program (Outcomes)

Secara keseluruhan, capaian keuangan per 31 Desember 2015 mencapai Rp. 8.367.480.085,- atau mencapai 97,48% dengan capaian fisik pelaksanaan kegiatan mencapai 99,10%.

3.2.2. Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran (Outputs)

Hasil evaluasi pencapaian sasaran kegiatan BPTP Pontianak pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll

Kegiatan yang termasuk dalam output ini adalah Demplot Pengendalian OPT Penting Regional Kalimantan di 3 Provinsi (seluas 15 hektar), Demplot Pengendalian OPT Penting Tanaman Perkebunan Spesifik Lokasi Kalimantan Barat di 5 lokasi (seluas 25 hektar), serta pemeliharaan kebun koleksi. Dana kegiatan sebesar Rp 181.850.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp. 179.310.500,- atau mencapai 98,60 %. Realisasi fisik mencapai 100 %, semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

2. Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan

Kegiatan yang termasuk dalam output ini adalah kegiatan kaji terap yang dilakukan oleh Laboratorium Lapangan, Laboratorium Utama Pengendalian Hayati, Sub Laboratorium Hayati dan Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan.

Jenis kegiatan kaji terap adalah sebagai berikut:

- a. Kajian Pembuatan Perekat Alami Untuk Pestisida Nabati
- b. Uji Pengaruh Pestisida Nabati Untuk Pengendalian OPT Tanaman Kakao
- c. Uji Perhitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pada Lahan Perkebunan
- d. Monitoring dan Pelaporan Sebaran Serangan OPT Penting Perkebunan
- e. Penyusunan Bahan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan

Dana kegiatan sebesar Rp 282.333.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp. 266.611.007,- atau mencapai 94,43 %. Terdapat efisiensi pada anggaran perjalanan BPTP Pontianak dan belanja barang non operasional lainnya. Realisasi fisik mencapai 100 %, semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3. Pemanfaatan Agensia Hayati

Kegiatan yang termasuk dalam output ini adalah:

- a. Uji Kemampuan Bakteri Simbion (*Xenorhabdus* spp) untuk Perbanyak NPS di Laboratorium
- b. Uji Pengendalian Penyakit Busuk Buah Kakao (*Phytophthora* spp) Secara Hayati Dengan Jamur *Trichoderma*
- c. Uji Persistensi Jamur *Metarhizium anisopliae* Isolat Kalbar pada Sarang Alami *Oryctes rhinoceros* di Lapangan
- d. Uji Pemanfaatan Senyawa Metabolit Sekunder Untuk Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (Uji Laboratorium)
- e. Perbanyak Agens Hayati di Laboratorium BPTP Pontianak
- f. Perbanyak Agens Hayati di Sub Laboratorium Hayati BPTP

Total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 66.913.000,- (Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan total realisasi sebesar 65.724.500,- atau sebesar 98,22%. Realisasi fisik mencapai 100 %, semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Kegiatan yang termasuk dalam output ini adalah:

- a. Administrasi Keuangan dan Kepegawaian
- b. Operasional Laboratorium
- c. Penyusunan Rencana Kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
- d. Monitoring dan Evaluasi

Total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 1.420.250.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah) dengan total realisasi sebesar 1.257.979.222,- atau sebesar 88,57%.

Komponen kegiatan Operasional Laboratorium adalah (a) Pra Akreditasi Laboratorium dengan capaian fisik mencapai 100 %. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, capaian kegiatan adalah proses Akreditasi Laboratorium ke Komite Akreditasi Nasional (KAN). Hasil Akreditasi masih dalam proses Komite Akreditasi Nasional; (b) Uji Banding Laboratorium capaian fisik mencapai 100% dan (c) Kegiatan Untuk Mendorong Legalitas Penggunaan APH, capaian fisik mencapai 75%.

Kegiatan dengan capaian fisik tidak mencapai 100% adalah Kegiatan Untuk Mendorong Legalitas Penggunaan APH. Kendala pencapaian target diantaranya adalah ketidaksiapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam pengajuan pendaftaran produk APH. Proses pengurusan kembali dokumen dokumen tersebut cukup menyita waktu sehingga pengajuan permohonan tidak dapat selesai hingga tahun anggaran berakhir.

Kegiatan untuk mendorong legalitas penggunaan APH tahun 2015 capaian fisiknya meliputi :

- Pembuatan formula APH untuk *Trichoderma harzianum* untuk pengendalian JAP karet, *Metarhizium anisopliae* untuk pengendalian hama kumbang kelapa, dan *M. anisopliae* untuk pengendalian hama kumbang janur kelapa
- Pengajuan patent untuk ketiga APH di atas ke KEMENKUMHAM Jakarta melalui Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Provinsi Kalimantan Barat

Beberapa hal yang belum dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran diantaranya : Pendaftaran merk APH oleh Koperasi Hayati BPTP Pontianak ke KEMENKUMHAM; Pendaftaran Biopestisida ke PPVPP, Kementerian Pertanian.

5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Anggaran tersedia untuk Output yang terdiri atas kegiatan pembayaran gaji pegawai ini adalah sebesar Rp. 5.516.480.000,-

(Lima Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Serapan hingga akhir bulan Desember mencapai Rp. 5.378.480.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau mencapai 97,49%. Pada tahun 2015 terdapat pagu minus untuk belanja gaji pegawai sebesar Rp. 469.045.000,-. Untuk mengatasi pagu minus tersebut, dilakukan revisi DIPA dengan melakukan efisiensi terhadap sisa belanja kegiatan yang sudah dilaksanakan berupa Belanja Barang sebesar Rp. 278.945.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp 190.100.000,- sehingga untuk pembayaran gaji bulan November dan Desember tidak ada masalah.

6. Layanan Perkantoran

Kegiatan dalam output ini adalah belanja pemeliharaan perkantoran, biaya pemeliharaan jaringan dan biaya operasional perkantoran lainnya. Anggaran tersedia adalah sebesar Rp. 1.068.409.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Serapan hingga akhir bulan Desember mencapai Rp. 953.254.849,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau mencapai 89,22%, dengan capaian fisik mencapai 100%

7. Pengadaan Prasarana Perkantoran

Anggaran tersedia adalah sebesar Rp. 284.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah). Dari dana tersebut dilakukan revisi untuk memenuhi pagu minus kekurangan gaji sebesar 190.100.000,-. Dari sisa dana tersedia, teralisasi sebesar Rp 93.860.000,- yang digunakan untuk pengadaan barang inventaris perkantoran. Capaian serapan mencapai 90,25% dari pagu tersedia dengan capaian fisik mencapai 100%.

3.1. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2015 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Perbandingan alokasi anggaran dan realisasi seluruh anggaran Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak Tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 6. Alokasi Anggaran per Kegiatan dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2014

PROGRAM	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)			OUTPUT (FISIK)
		PAGU	REALISASI	%	
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	- Operasional Laboratorium (005)	169.800.000,-	54.863.400,-	32,31	80
	- Pembangunan Kebun Contoh, Demplot dll (006)	208.985.000,-	208.100.000,-	99,58	100
	- Pengawasan Peredaran Benih (007)	8.900.000,-	8.695.000,-	97,70	100
	- Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan (008)	331.035.000,-	323.062.750,-	97,59	95
	- Pemanfaatan Agens Hayati (009)	211.590.000,-	211.108.000,-	99,77	100
	- Administrasi Keuangan dan Kepegawaian (011)	273.750.000,-	273.211.400,-	99,80	100
	- Administrasi Keuangan dan Kepegawaian (011)	53.000.000,-	28.851.200,-	54,44	100
	- Penyusunan Rencana Kerja (012)	293.150.000,-	283.021.300,-	96,54	100
	- Peningkatan Kapabilitas Pegawai/Petugas (013)	689.929.000,-	677.956.936,-	98,26	100
	- Monitoring dan Evaluasi (014)	6.070.401.000,-	5.644.671.466,-	93,04	95
	- Layanan Perkantoran (994)	110.650.000,-	110.270.000,-	99,56	100
	- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (997)				
		TOTAL	8.421.190.000	7.823.811.452,-	

Rata-rata persentase pencapaian target fisik kegiatan BPTP Pontianak mencapai 94,10%.

Tabel 7. Alokasi Anggaran per Kegiatan dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2015

PROGRAM	OUTPUT	Keuangan			Fisik
		Pagu	Realisasi	%	%
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll	181.850.000	179.310.500	98,60	99
	Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan	272.333.000	267.866.007	98,36	99
	Pemanfaatan Agensia Hayati	66.913.000	66.724.500	99,72	100
	Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	1.418.461.000	1.385.268.938	97,66	100
	Layanan Perkantoran	6.550.413.000	6.374.450.140	97,31	100
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	93.900.000	93.860.000	99,96	100
	TOTAL	8.583.870.000	8.367.480.085	97,48	99

3.4. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

3.4.1. Permasalahan

3.4.1.1. Administrasi

- 1) Koordinasi belum optimal sehingga persepsi tentang perlindungan belum sinergis antara instansi yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan BPTP Pontianak.
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.11/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 6 Februari 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak, salah satu fungsinya yaitu melaksanakan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) perkebunan, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur secara organisasi telah membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) yang membawahi perangkat perlindungan perkebunan. Terkait dengan SK Menteri Pertanian No.11/Permentan/OT.140/2/ 2008 tanggal 6 Februari 2008

untuk Provinsi Kalimantan Utara, BPTP Pontianak belum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

3.4.1.2. Teknis

- 1) Kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan tanaman masih terbatas.
- 2) Terbatasnya personil petugas pengamat OPT di lapangan. Jumlah petugas yang ada belum mampu menjangkau seluruh wilayah kerja BPTP di seluruh Pulau Kalimantan, sehingga pemantauan terhadap serangan OPT perkebunan dan pengendaliannya belum dapat terjangkau dengan baik.
- 3) Petugas UPPT yang sudah dididik secara khusus dalam bidang perlindungan tanaman, sudah ada yang memasuki masa purna tugas, dan sebagian besar akan segera pensiun
- 4) Kondisi geografis Kalimantan Barat dan sarana transportasi/infrastruktur jalan pada beberapa wilayah kurang memadai, sehingga koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi dan pembinaan petani belum dapat menjangkau semua wilayah kerja.
- 5) Adanya anomali iklim seperti musim hujan atau musim kering yang terjadi di luar kebiasaan, banjir dan kebakaran lahan gambut dan lahan kebun yang berdampak langsung terhadap penurunan produksi perkebunan.

3.4.1.3. Perencanaan

- 1) Masih adanya kegiatan yang belum sepenuhnya mengikuti Pedoman Teknis;
- 2) Kegiatan teknis yang dipengaruhi kondisi fisiologis tanaman di lapangan
- 3) Keterlambatan petugas dalam melakukan penyusunan CP/CL

3.4.1.4. Pengorganisasian

- 1) Sebagian besar SDM Petugas pengamat OPT memasuki usia pensiun;

- 2) Petunjuk teknis seringkali tidak sampai ke tingkat lapangan (petugas dan petani);
- 3) Kurangnya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan, demplot;
- 4) Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten terkait kegiatan perlindungan perkebunan khususnya dalam hal monitoring dan pengendalian OPT perkebunan;

3.4.1.5. Pelaksanaan

- 1) Implementasi Teknologi perlindungan perkebunan yang diberikan kepada petani melalui kegiatan demplot belum sepenuhnya diterapkan oleh petani pelaksana dan belum tersosialisasi dengan baik kepada kelompok tani di sekitarnya;
- 2) Banyaknya permasalahan dan luasnya wilayah gangguan usaha yang harus ditangani dengan waktu yang terbatas;
- 3) Pengetahuan dan keterampilan petani sebagian besar petani belum memadai.

3.4.1.6. Pengawasan

- 1) Keterbatasan jumlah petugas pengamat di lapangan menyebabkan pemantauan kegiatan-kegiatan di lapangan belum optimal.

3.4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian fisik. Rencana aksi tersebut meliputi:

3.4.2.1. Administrasi

- 1) Meningkatkan koordinasi melalui kegiatan-kegiatan regional, sehingga diperoleh sinergitas persepsi tentang perlindungan antar instansi yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan BPTP Pontianak.

- 2) Mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan untuk memasukkan Provinsi Kalimantan Utara menjadi wilayah kerja BPTP Pontianak sehingga kondisi OPT diprovinsi tersebut dapat diketahui/termonitor.

3.4.2.2. Teknis

- 1) Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat, melalui petugas UPPT akan pentingnya perlindungan tanaman masih terbatas.
- 2) Menyusun analisis kebutuhan pegawai dan mengusulkan penambahan personil petugas khususnya pengamat OPT di lapangan agar mampu menjangkau seluruh wilayah kerja BPTP di seluruh Pulau Kalimantan.
- 3) Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan petugas melalui penyelenggaraan kegiatan kursus, pertemuan teknis maupun magang ke instansi terkait.
- 4) Memfasilitasi petugas dengan sarana transportasi yang memadai untuk menjangkau wilayah binaan di wilayah kerja.
- 5) Meningkatkan peran petugas dalam melakukan monitoring OPT dan gangguan usaha perkebunan.

3.4.2.3. Perencanaan

- 1) Melakukan sosialisasi pedoman teknis kegiatan dan seminar kegiatan sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan
- 2) Melakukan percepatan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak tergantung pada musim
- 3) Mempersiapkan CP/CL dari tahun sebelumnya.

3.4.2.4. Pengorganisasian

- 1) Melakukan analisis kebutuhan pegawai dan disampaikan usulan penambahan pegawai;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan secara intensif baik di internal dinas maupun dilapangan/petani;

- 3) Mengintensifkan pengawalan, pedampingan dan pembinaan pembinaan kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan melalui petugas UPPT setempat.
- 4) Menyampaikan hasil monitoring OPT setiap triwulan kepada seluruh dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kab/Kota sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan langkah tindak lanjut pengendalian OPT di wilayah Propinsi/Kab/Kota;

3.4.2.5. Pelaksanaan

- 1) Mengintensifkan pengawalan, pedampingan dan pembinaan pembinaan kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan melalui petugas UPPT setempat.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan perlindungan perkebunan secara intensif baik di internal dinas maupun dilapangan dengan dinas yang membnidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten/ Kota serta pada tingkat petani.
- 3) Mengoptimalisasi peranan kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan perlindungan di kebunnya.

3.4.2.6. Pengawasan

- 1) Memerlukan kontrol dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara intensif;
- 3) Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan perkebunan;

BAB IV. PENUTUP

Kinerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak selama Tahun 2015 telah tercermin dalam Laporan Kinerja (LAKIN) yang telah menggambarkan keberhasilan dan kegagalan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang terlihat dari capaian kinerja sasaran yang telah diraihinya

4.1. Kesimpulan

Secara umum, capaian kinerja tahun 2015 terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan menunjukkan tingkat capaian sebesar 97,48 % untuk realisasi keuangan sedangkan rata-rata realisasi fisik mencapai 99,10 % yang berarti target-target kinerja yang ditetapkan dalam rencana kinerja hampir tercapai secara maksimal.

4.2. Saran Rekomendasi

Laporan Kinerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak yang disusun dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja BPTP Pontianak.

Berdasarkan pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam proses penilaian mulai dari penyusunan perencanaan, perekaman penyelenggaraan kegiatan, sampai dengan kompilasi pelaporan penyelenggaraan maupun cara penilaiannya.

Berdasarkan permasalahan dan target yang ditetapkan, maka direkomendasikan sebagai berikut:

- 1) Kinerja Tim SPI perlu dioptimalkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan;
- 2) Penilaian kinerja atas satker terbukti dapat meningkatkan realisasi keuangan dan fisik yang cukup signifikan, sehingga perlu dilanjutkan;
- 3) Laporan ini sangat berguna sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 (Berdasarkan Dari RKT / Renstra)

Unit Kerja : Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak

Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

PROGRAM		Anggaran Keluaran (Rp)			Capaian Output		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll	181.850.000	179.310.500	98,60	40 Ha	40 Ha	100
	Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan	272.333.000	267.866.007	98,36	10 Paket	10 Paket	100
	Pemanfaatan Agensia Hayati	66.913.000	66.724.500	99,72	7 Jenis	7 Jenis	100
	Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	1.418.461.000	1.385.268.938	97,66	12 laporan	12 laporan	100
	Layanan Perkantoran	6.550.413.000	6.374.450.140	97,31	12 bulan	12 bulan	100
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	93.900.000	93.860.000	99,96	3 paket	2 paket	100
	TOTAL	8.583.870.000	8.367.480.085	97,48			